

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang tersebut, pemerintah daerah telah diberi kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pembangunan, pengendalian, dan evaluasi. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan segala potensi yang ada di daerah dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya. Untuk memahami sejauh mana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membangun daerahnya, kita perlu menilai sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam memajukan daerah dan mengelola keuangan daerahnya (**B. I. Sari and Wati 2021**).

Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja daerah Pemerintah Daerah berusaha untuk meningkatkan kinerja yang baik. Untuk mengukur tingkat kemampuan kinerja Pemerintah Daerah diperlukan suatu teknik pengukuran kinerja salah satu teknik untuk menganalisis laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah Analisis Rasio Keuangan, Analisis Rasio Keuangan adalah cara analisa dengan menggunakan perhitungan-perhitungan

perbandingan atas data kuantitatif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Analisis Rasio Keuangan terhadap APBD ini dilakukan dengan cara menghitung kinerja keuangan daerah dan kemampuan daerah. Untuk menghitung kinerja keuangan daerah dengan menghitung ; Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efisiensi, Rasio keserasian belanja tidak langsung terhadap total belanja, dan Rasio belanja langsung terhadap total belanja terhadap APBD. Sedangkan Analisis kemampuan keuangan daerah dengan cara menghitung pertumbuhan (*growth*), Analisis peranan (*share*), dan Peta kemampuan keuangan daerah. Kemudian dari masing-masing perhitungan dideskripsikan data dari hasil perhitungan rasio keuangan. Analisis rasio keuangan terhadap APBD diharapkan dapat menjadi salah satu alat ukur untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Padang, Pariaman dan Sijunjung dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Padang, Pariaman dan Sijunjung dalam menyusun dan menetapkan APBD yang akan datang (**Arnaldi and Yusra 2020**).

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Pendapatan BPKAD Kota Padang
Tahun 2019-2021
(dalam milyaran rupiah)

Uraian Penerimaan	Anggaran/Target			Realisasi Penerimaan			%
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
Pendapatan Asli Daerah	27.147	32.138	23.474	32.048	18.613	24.770	0,911

Uraian Penerimaan	Anggaran/Target			Realisasi Penerimaan			%
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
Dana Perimbangan	1.580.181	1.452.277	1.441.907	1.524.369	1.414.136	1.432.132	0,975
Dana Bagi Hasil	67.631	98.766	57.312	47.292	73.316	91.114	0,946
Dana Alokasi Umum	1.176.301	1.068.755	1.044.871	1.176.301	1.061.387	1.044.871	0,998
Dana Alokasi Khusus	336.247	284.755	339.724	300.775	279.432	287.146	0,903
Dana Insentif Daerah	32.141	44.449	25.381	52.141	44.449	25.381	1

(Sumber : Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Kota Padang Tahun 2019-2021)

Berdasarkan realisasi pendapatan pada tahun 2019-2021 mengalami kenaikan dan penurunan dari target anggaran yang ditetapkan. Pada Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami kenaikan sebesar 0,998%. Penurunan terjadi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 0,903% yang mana realisasi penerimaan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Dan pada Dana Insentif Daerah (DID) juga mengalami kenaikan sebesar 1% realisasi penerimaannya sesuai dengan target anggaran yang ditetapkan.

Dengan adanya perubahan naik turunnya realisasi pendapatan, penulis berasumsi bahwa realisasi pendapatan BPKAD Kota Padang akan menentukan naik turunnya kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil penilaian secara kuantitatif dari suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran dan tujuan pemerintah daerah digunakan sebagai bahan

untuk mengevaluasi dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan agar kualitas sektor publik jauh lebih baik (**Arnaldi and Yusra 2020**).

Kinerja pemerintahan dari pengelolaan keuangannya berada di bawah kualitas yang diharapkan dan umumnya buruk atau lemah. Berbagai upaya evaluasi terhadap pengelolaan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah Indonesia menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Fenomena ini menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang ditandai dengan munculnya berbagai tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan dan akuntabilitas pemerintah. Fenomena ini menimbulkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Perbaikan regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas kinerja yang memuaskan. Namun kinerja dan kualitas informasi laporan keuangan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan (**Nirwana and Haliah 2018**).

Ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar pula peluang kemudahan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional dan roda pemerintahan daerah akan cenderung mengalami kesulitan, karena semakin besar ukuran pemerintah maka dapat memberi kelancaran dalam memperoleh pendapatan asli daerah. (**Karlinda, Azizi, and Sopali 2021**) ukuran pemerintah daerah memberikan informasi terkait dengan seberapa besar atau kecil pemerintah daerah tersebut. Dalam mengukur ukuran pemerintah daerah dapat digunakan berbagai proksi

dari hal-hal tertentu. (**N. M. D. P. Sari and Mustanda 2019**) ukuran pemerintah daerah dapat diproksikan dengan total aset yang dimiliki daerah tersebut. Agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakatnya harus didukung oleh aset yang memadai.

Ukuran Pemda merupakan salah satu variabel yang mempresentasikan besar/kecilnya suatu pemerintahan dan biasanya diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan, dan tingkat produktivitas. Suatu daerah yang memiliki ukuran daerah atau total aset yang besar akan mudah dalam menjalankan kegiatan operasional, sehingga Pemda akan maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (**Cahyono and Aisy 2021**).

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kekuasaan kepada Pemda dalam melaksanakan otonomi daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi (**Cahyono and Aisy 2021**).

Keuangan daerah memainkan peran yang krusial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Perwujudan kesejahteraan masyarakat daerah akan lebih mudah dicapai apabila pemerintah daerah memiliki kondisi keuangan yang baik. Keuangan pemerintah daerah yang baik dapat dilihat dari berbagai indikator, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat kemandirian daerah, dan sebagainya. Namun, keuangan daerah yang baik mustahil dicapai apabila pengelolaan keuangan di daerahnya tidak memadai. Untuk pencapaian pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan analisis dan evaluasi

pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu dengan menganalisis faktor-faktor yang dapat menjadi celah signifikan untuk memaksimalkan keuangan daerah. Hal ini diperlukan karena hasil pengukuran kinerja keuangan dapat memberi perspektif tambahan bagi pengelola keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas keuangan daerah (**Karlinda, Azizi, and Sopali 2021**).

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu unsur APBD yang dapat dijadikan acuan untuk melihat baik buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah karena jika kontribusi pendapatan asli daerah di duta daerah besarr, bantuan dana dari pemerintah pusat akan kecil, maka tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat akan berkurang. Target adanya dana transfer dari pusat berguna dalam mengurangi ketimpangan antar wilayah dan meningkatkan pembangunan infrastruktur sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera (**Dewata, Sari, and Nouvanti 2021**).

Belanja modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan *output* berupa aset tetap. Dalam pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan tersebut, ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik atau dipakai oleh masyarakat dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik (**Aditya and Maryono 2018**). Menurut (**Abid, Rahayu, and Aminah 2018**) belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal

sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut digunakan.

Pemerintah daerah seharusnya bisa mengalokasikan belanja modal dengan cukup tinggi dibandingkan belanja rutin yang relatif kurang produktif. Peningkatan pengalokasian anggaran belanja modal bisa menyebabkan peningkatan pada infrastruktur. Belanja modal bisa mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan di suatu daerah, bisa diartikan bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah sedikit terganggu. Belanja modal mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Belanja daerah bisa menjadi kekuatan di daerah untuk menggerakkan roda perekonomian daerah.

Menurut **(Sriwinarti and Artaningtyas 2021)**, belanja modal dimaksudkan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah, yaitu (a) belanja peralatan dan mesin; (b) belanja tanah; (c) belanja modal bangunan dan gedung; (d) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan; (e) dan pengeluaran aset tetap lainnya. Belanja modal merupakan salah satu komponen belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi.

Analisa rasio merupakan salah satu alat analisis keuangan yang paling banyak digunakan, dimana dalam perhitungan rasio ini menggunakan perhitungan aritmatika sederhana yang dapat diinterpretasikan, dimana setiap perhitungan rasio akan jauh lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan hasil perhitungan tahun sebelumnya. Analisa rasio keuangan merupakan proses analisis dan

penilaian yang membantu dalam menjawab pertanyaan yang sudah sewajarnya diajukan, jadi itu merupakan alat untuk mencapai tujuan (**Denny 2018**).

Analisis laporan keuangan digunakan untuk membantu pengguna laporan keuangan mengenai bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana cara menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan dan bagaimana menggunakan informasi dalam laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Analisis kinerja keuangan daerah dapat digunakan pengguna laporan keuangan daerah untuk memahami kinerja pemerintah daerah. Salah satu alat yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan daerah adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Hasil dari perhitungan rasio-rasio keuangan perlu diinterpretasikan, sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja keuangan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan (**Siswanto 2022**).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan asli daerah yaitu segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

dipergunakan untuk keperluan daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang bisa disebut dengan *expenditure* yang terdiri dari belanja rutin atau belanja operasional pemerintah daerah dalam satu periode tertentu. Belanja tersebut dipergunakan untuk memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya. Sebaik-baik pelayanan yang diberikan, menunjukkan semakin baik pengelolaan pembelanjaan pemerintah daerah. Pengelolaan pembelanjaan yang baik menciptakan *value for money* yang baik, sehingga penilaian akan kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi baik pula. Belanja modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabotan, dan sebagainya. Pada dasarnya, pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik (**Fernandes and Putri 2022**).

Menurut (**Fadhilah 2022**) alat untuk menganalisis kinerja keuangan daerah adalah menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan keuangan. Rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah yaitu rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan PAD, menilai kemandirian keuangan dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

Berbagai penelitian mengenai aspek yang berhubungan dengan pemahaman ukuran pemerintah, pendapatan asli daerah, belanja modal dan kinerja keuangan pemerintah daerah telah sering dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara lain oleh **(N. M. D. P. Sari and Mustanda 2019)** bahwa ukuran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan menurut **(Antari and Sedana 2018)** dari analisis data yang dijelaskan, dapat diketahui bahwa pendapatan asli pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut **(Wafa & Moh. Sirril, 2018)** penelitian ini bertujuan mengetahui apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Rasio Laporan Keuangan sebagai Variabel Intervening”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2019-2021 tidak sesuai target anggaran di BPKAD Kota Padang.
2. Dana perimbangan pada tahun 2020 tidak sesuai target anggaran di BPKAD Kota Padang.
3. Dana bagi hasil tidak sesuai target anggaran di BPKAD Kota Padang.

4. Dana alokasi umum pada tahun 2020 tidak sesuai target anggaran di BPKAD Kota Padang.
5. Dana alokasi khusus tidak sesuai target anggaran di BPKAD Kota Padang.
6. Penerimaan pendapatan kurang di BPKAD Kota Padang.
7. Dana alokasi khusus kurang di BPKAD Kota Padang.
8. Penerimaan pendapatan yang kurang mempengaruhi kinerja keuangan di BPKAD Kota Padang.
9. Perbandingan pada bulan September ke Oktober mengalami kenaikan tetapi tidak mencapai target anggaran yang ditetapkan.
10. Tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah kurang di BPKAD Kota Padang.

1.3. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar permasalahan yang diteliti lebih terfokus pada tujuan penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah dan belanja modal sebagai variabel independen, rasio laporan keuangan sebagai variabel intervening.
2. Penelitian ini dilakukan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang dan Pariaman khususnya Kantor BPKAD Kota Padang dan Pariaman.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap rasio laporan keuangan di BPKAD Sumatera Barat pada tahun 2022?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap rasio laporan keuangan di BPKAD Sumagtera Barat pada tahun 2022?
3. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap rasio laporan keuangan di BPKAD Sumatera Barat pada tahun 2022?
4. Bagaimana pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di BPKAD Sumatera Barat pada tahun 2022?
5. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di BPKAD Sumatera Barat pada tahun 2022?
6. Bagaimana pengaruh belanja modal berpengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah di BPKAD Sumatera Barat pada tahun 2022?
7. Bagaimana pengaruh rasio laporan keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah di BPKAD Sumatera Barat pada tahun 2022?
8. Bagaimana pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui rasio laporan keuangan sebagai variabel intervening di BPKAD Sumatera Barat pada tahun 2022?
9. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui rasio laporan keuangan sebagai variabel intervening di BPKAD Sumatera Barat pada tahun 2022?

10. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui rasio laporan keuangan sebagai variabel intervening di BPKAD Sumatera Barat pada tahun 2022?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mengungkap :

1. Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap rasio laporan keuangan di BPKAD Sumatera Barat tahun 2022.
2. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap rasio laporan keuangan di BPKAD Sumatera Barat tahun 2022.
3. Pengaruh belanja modal terhadap rasio laporan keuangan di BPKAD Sumatera Barat tahun 2022.
4. Pengaruh ukuran pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di BPKAD Sumatera Barat tahun 2022.
5. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di BPKAD Sumatera Barat tahun 2022.
6. Pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di BPKAD Sumatera Barat tahun 2022.
7. Pengaruh rasio laporan keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di BPKAD Sumatera Barat tahun 2022.

8. Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui rasio laporan keuangan sebagai variabel intervening di BPKAD Sumatera Barat tahun 2022.
9. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui rasio laporan keuangan sebagai variabel intervening di BPKAD Sumatera Barat tahun 2022.
10. Pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui rasio laporan keuangan sebagai variabel intervening di BPKAD Sumatera Barat tahun 2022.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan kepada rumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini memiliki manfaat positif bagi :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara teoritis dibangku perkuliahan, terutama ilmu pengetahuan tentang Manajemen Keuangan sehingga penulis mendapatkan pengalaman baru dalam berpikir dan juga menambah daya analisis penulis.

2. Bagi Akademisi

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa serta merupakan perwujudan dari pengalaman Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau alat replikasi bagi peneliti di masa yang akan datang, yang tertarik untuk membahas permasalahan yang sama dengan yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Pariaman

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi pimpinan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Pariaman, dan dapat memberikan solusi alternatif dalam meningkatkan kinerja pegawai.